

ARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI BAWAH JOSEPH BIDEN

7

Ziyad Falahi dan Poltak Partogi Nainggolan

Abstrak

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Amerika Serikat (AS), Joseph (Joe) Biden, telah menegaskan komitmennya untuk mengembalikan keadidayaannya AS ke dunia internasional. Peran internasional AS yang surut secara drastis di era Trump yang fokus pada kebijakan American First kini akan dibawa Biden dengan mengembalikan harapan para sekutunya untuk dapat kembali mengimbangi ekspansi China dan Rusia di berbagai kawasan. Kembalinya peran AS diharapkan dapat merespons kekhawatiran dunia pada kontrol dan kesewenang-wenangan kedua negara seteru lama AS dalam menjalankan kebijakan luar negerinya di berbagai bidang pada era baru pasca-Perang Dingin. Analisis terhadap arah kebijakan baru AS memberi penjelasan pada konsekuensi relevan yang muncul dan dihadapi negara-negara kawasan.

Pendahuluan

Tidak sampai dua bulan pasca-pelantikannya pada 8 Maret 2021, Joe Biden telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi sebesar US\$1,9 triliun. Kebijakan yang disambut positif di dalam negeri AS ini, bagi para pendukung kebijakan AS yang *outward looking* menimbulkan kekhawatiran akan menghambat langkah Biden untuk bisa mengembalikan peran aktif AS di dunia internasional. Sebab, nilai stimulus ekonomi ini cukup besar dan seolah memperlihatkan keberpalingan Biden dalam waktu singkat dari tekadnya semula

untuk tidak disandera oleh berbagai kebijakan domestik.

Secara simultan, perkembangan dunia internasional pada awal tahun 2021 ini telah memperlihatkan kondisi yang semakin tidak menggembirakan karena meningkatnya eskalasi ketegangan di beberapa wilayah panas seperti Timur Tengah, Ukraina, dan Laut China Selatan. Secara lebih spesifik terlihat beberapa negara kembali dilanda konflik domestik akibat proses transisi demokratis yang tidak berjalan baik dan kegagalan pemerintah nasional yang berkuasa dalam menanganinya, seperti yang tengah berlangsung di Myanmar,



Irlandia Utara, dan beberapa negara di Afrika. AS memang tidak diharapkan kehadirannya sebagai polisi dunia, namun surut, dan terlebih, absennya peran negara adidaya itu untuk bisa berperan secara signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan global, berpengaruh terhadap prospek perdamaian. PBB sendiri sejak lama tidak bisa diharapkan dapat menjalankan sendiri perannya dalam menciptakan serta memelihara keamanan dan perdamaian dunia, tanpa didukung peran negara-negara besar seperti AS, China, dan Rusia sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan.

Tulisan ini membahas dan menganalisis apa relevansi stimulus ekonomi yang diluncurkan Biden dan pengaruhnya terhadap kinerja kebijakan luar negeri AS. Tulisan ini akan mengungkap apakah kekhawatiran para pendukung supremasi kekuatan AS yang meragukan sulitnya kembali negara adidaya pemenang Perang Dingin itu untuk kembali berjaya di kancah internasional, sudah tepat. Pembahasan masalah ini dengan sendirinya akan memberi penjelasan terhadap pertanyaan, apakah kehadiran AS ke dunia internasional dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengurangi eskalasi, apalagi dapat menyelesaikan berbagai konflik yang tengah terjadi di berbagai kawasan dunia.

Makna Stimulus Ekonomi

Peluncuran stimulus ekonomi yang besar wajar dilakukan presiden baru, Biden, demi merespons masalah mendesak yang pertama-tama harus diatasi AS sebelum bisa bergerak ke luar. Ini tidak boleh diartikan

sebagai kebijakan *inward looking* seperti pada masa Trump yang memang ingin fokus pada pilihan *American First*. Stimulus ini sebuah langkah pertama yang tepat untuk mengatasi persoalan membludaknya pengangguran di AS akibat Covid-19, selain untuk mengatasi secara lebih serius penanganan pandemi itu. Kebijakan ini dibutuhkan untuk mendorong secara simultan agar perekonomian nasional dapat bergerak kembali dalam mendukung kebijakan luar negeri AS. Banyak yang luput memperhatikan, dalam proposal anggaran belanja nasional yang disusun pemerintahnya, AS juga telah menyiapkan US\$704 miliar khusus untuk belanja militer untuk memastikan tidak terjadinya pemotongan belanja militer sebagai konsekuensi dari peluncuran stimulus ekonomi tersebut.

Oleh Pemerintah Biden, kebijakan stimulus diharapkan akan membangkitkan kembali perekonomian AS untuk tetap bisa mendukung negeri itu mempertahankan hegemoninya, yang oleh para pengamat diidentifikasi sebagai *benign hegemon* (Tam Nguyen Huu dan Denis Dillan, 2020). Dalam konteks ini, kinerja keadidaya AS bisa meniru jalan China dewasa ini, dengan bersandar pada kekuatan ekonomi domestik daripada melakukan agresi secara militer demi kepentingan multilateral. Secara kritis dapat dilihat, implementasi hegemoni semacam ini dianggap sesuai dengan ideologi dan langkah Partai Demokrat. Adapun kampanye 'membeli produk AS' tidak dapat diartikan sebagai penerapan kebijakan yang *inward looking*, selain untuk tujuan mengerem laju dominasi produk China yang

merajalela di dunia dan dalam negeri AS sebelum ini.

Stimulus sangat berarti bagi mereka yang berpenghasilan rendah, terutama untuk menyediakan pinjaman bagi mahasiswa. Kebijakan ini juga sangat bermanfaat dalam mengalokasikan US\$350 miliar untuk pemerintah negara bagian dan lokal, di samping US\$130 miliar untuk pembukaan kembali sekolah, US\$49 miliar untuk penelitian Covid-19, dan US\$14 miliar untuk distribusi vaksin. Penggelontoran dana stimulus US\$1,9 triliun diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi berbagai sektor untuk membangkitkan AS dari keterpurukan ekonomi di bawah Trump, yang menghalangi kebijakannya untuk bisa mempertahankan hegemoni AS di tingkat global. Kebijakan ini juga dijalankan justru untuk menghilangkan semua subsidi dan celah industri yang masih memakai bahan bakar fosil, sehingga akan mendukung kebijakan global Biden dan Demokrat untuk kembali ke hasil-hasil Konferensi Perubahan Iklim di Paris.

Kembalinya Peran Global AS

Di tingkat global, selain merespons kembali komitmen AS pada hasil-hasil Konferensi Perubahan Iklim di Paris, Biden menawarkan proposal senilai US\$4 miliar untuk pembiayaan program vaksinasi global. Dalam pertemuan konferensi keamanan nasional di Munich, Jerman, Biden menekankan pentingnya demokrasi untuk menata kembali situasi dunia menuju masa depan yang lebih baik dan stabil. Ini juga merupakan perhatian dan kepentingan nasional AS, akibat ancaman instabilitas domestik pasca-

pemilu yang mengguncang negeri itu dengan aksi unjuk rasa di Gedung Kongres AS.

Terhadap para sekutu Eropa yang selama ini ditinggalkan pendahulunya, Trump, Biden menyatakan kembali komitmennya untuk membawa kembali negerinya mendukung mereka. AS yang baru di bawah Biden sejak semula telah menegaskan keinginannya untuk kembali ke dalam Kesepakatan Iklim Paris. Pengungkapan tekad ini secara langsung sangat dibutuhkan untuk bisa menormalisasi kembali hubungan AS-Uni Eropa (UE) yang telah mencapai titik nadir pada era Trump yang dinilai arogan dan hanya memikirkan kepentingan sendiri.

Berbeda dengan pendahulunya, AS mulai kembali fokus dengan kebijakan luar negeri dan pengerahan kapal-kapal angkatan perangnya di wilayah Pasifik. Hanya selang beberapa hari setelah stimulus ekonomi US\$1,9 triliun disetujui, AS mengadakan pertemuan dengan Australia, India, dan Jepang, sekutu poros barunya pada masa pandemi dalam QUAD untuk menghambat China dengan kebijakan OBOR (*One Belt One Road*)-nya. Kuartet koalisi baru ini diharapkan mampu membendung China di Pasifik, di samping berperan dalam mendukung pencapaian target yang optimal untuk nol emisi di masa depan, mengikuti Kesepakatan Paris. Sejalan dengan ini, langkah lebih maju dalam memerangi laju penyebaran Covid-19 di wilayah Indo-Pasifik telah menjadi perhatian mereka (Quad). Secara menggembirakan, koalisi baru pendukung Indo-Pasifik ini telah menyepakati sebuah perjanjian pembiayaan untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi

vaksin virus corona di India.

Berbeda dengan Trump, Biden lebih percaya diri dalam berhadapan dengan seterusnya, yakni China, di meja perundingan. Ia mengirim Menlu Antony Blinken untuk menghadapi China di meja perundingan bilateral secara langsung, demi menampilkan sikap baru yang dialogis dan lebih maju, bukan lempar batu sembunyi tangan yang tidak jelas arahnya dan tanpa prospek. Lewat sikap seperti inilah, pertemuan dan diplomasi antara pihak Kemenlu AS dengan China dapat diadakan di negara bagian Alaska pada 18 Maret 2021. Pertemuan itu sendiri telah berlangsung secara alot sehingga memberi ruang untuk saling mengecam, tidak lagi sekadar mengkritik. AS telah melancarkan kecaman terhadap China yang dituding telah menyebabkan ketidakstabilan di Xinjiang dan Hong Kong, selain berbagai tindakan anti-demokrasi dan aksi pelanggaran HAM. Sebaliknya, China telah mengecam AS tidak memberikan contoh yang baik yang dapat dijadikan model bernegara, karena masih adanya perlakuan buruk terhadap kelompok minoritas di AS, termasuk imigran keturunan Asia atau asal China.

Di Timur Tengah, di bawah Biden, AS menunjukkan sikap barunya yang mau menegaskan *the Deal of the Century* yang dibuat Trump dan amat merugikan Palestina. Sebagai bukti keprihatinannya atas nasib rakyat Palestina yang terabaikan di bawah kebijakan Trump, Biden telah mengeluarkan paket bantuan senilai US\$235 juta yang terdiri dari sumbangan US\$150 juta pada badan PBB yang menangani

pengungsi Palestina, US\$75 juta dalam bentuk bantuan ekonomi dan pembangunan untuk penduduk Palestina yang bermukim di wilayah Tepi Barat dan jalur Gaza, serta US\$10 juta lagi untuk kebijakan pembinaan perdamaian secara konsisten dalam jangka panjang. Sikap Biden dengan berbagai paket bantuan ekonominya ini paling tidak ingin menampilkan wajah politik luar negeri AS yang lebih berimbang di Timur Tengah, khususnya terhadap Palestina, dan negara-negara Arab yang akhir-akhir ini dinilai kian melupakan tanah dan nasib bangsa yang masih dijajah kaum Zionis tersebut.

Kembalinya peran regional dan global AS dapat dilihat juga dalam kasus gagalnya kudeta terhadap Raja Abdullah II, sekutu tradisional AS dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Percobaan kudeta yang dilakukan Pangeran Hamzah dan didukung Mossad, intelijen Israel, dan berhasil digagalkan Raja Abdullah II, juga berkat peran AS yang menegaskan sikapnya yang menentang kudeta itu, dan sebaliknya, mendukung pemerintah yang sah.

Pemerintah Biden menolak memberikan dukungan pada langkah anti-demokrasi yang buruk dan sangat dikecam tersebut. AS bersama para sekutunya, antara lain, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, kembali menegaskan memberikan legitimasi pada Raja Abdullah II di Jordania yang tidak pernah mendukung *the Deal of the Century*, yang telah diupayakan Trump dan beberapa negara Arab. Dukungan pada Raja Abdullah II telah diperlihatkan Biden dengan lobinya pada Dewan Negara Teluk (*Gulf Countries Council/GCC*) untuk sepenuhnya

berada di balik Pemerintahan Raja Abdullah II dan menentang kudeta Pangeran Hamzah. Kembali ingin menunjukkan sikapnya yang konsisten terhadap demokrasi, penghormatan hukum dan kebebasan sipil, AS pun berada di garis depan menegakan rezim diktator militer Myanmar yang telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi yang telah memenangkan pemilu.

Kebijakan Biden diperlihatkan secara lebih luas ke bagian-bagian dunia lainnya. Di kawasan Teluk, AS kembali menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan beberapa sekutunya. Untuk itu, Presiden Biden telah mengirim Timothy Lenderking untuk mengadakan pertemuan dengan utusan PBB Martin Griffiths dan Arab Saudi, Saeed al Jabber, untuk menghentikan *proxy war* antara pemerintah yang sah dengan kelompok pemberontak Houthis dukungan Iran di Yaman. Dengan Iran sendiri, Biden membuka perundingan baru di Wina, Austria, untuk melanjutkan kesepakatan nuklir dan mencari solusi penghentian embargo ekonomi, demi mengurangi eskalasi ketegangan yang terus berusaha digagalkan Israel dengan serangannya ke reaktor di Natanz.

Unjuk kekuatan juga diperlihatkan AS dengan mengirimkan dua kapal perangnya ke Selat Bosphorus untuk merespons aksi agresif baru Rusia yang mengirimkan militernya ke Ukraina. Pada era Trump, NATO ditinggalkan sendiri menghadapi ancaman langsung Rusia terhadap UE. Juga, untuk merespons sikap agresif China yang menjadi-jadi, Biden tidak gentar mengirimkan

dua kapal induk bertenaga nuklir sekaligus ke Laut China Selatan yang disertai kapal penjelajah dan dilengkapi senjata rudal. Pengurangan eskalasi ketegangan dan penyebaran konflik di berbagai kawasan berusaha dilakukan dengan tetap mengedepankan diplomasi yang didukung peningkatan kehadiran militer AS secara nyata di lapangan.

Penutup

Penjelasan dan pembahasan di atas telah menunjukkan bagaimana AS di bawah kepemimpinan presiden baru, Joe Biden, ingin mengembalikan eksistensi AS tetap sebagai negara adidaya pemenang Perang Dingin. Jelas sekali, baik melalui upaya diplomasi dan negosiasi di meja perundingan maupun pemberian bantuan ekonomi dan kehadiran kekuatan militer di lapangan, sebagai sebuah negara adidaya dunia, AS tidak mau kehilangan peran internasionalnya menghadapi seteru lamanya, yakni China dan Rusia, yang terus mencari dan mengembangkan hegemoninya. Peran internasional ini pernah lama dimainkan dan dinikmati dalam periode panjang sebelumnya, pada awal Perang Dunia II hingga berakhirnya Perang Dingin dan dimulainya milenium baru. Demi kepentingan nasionalnya, sindrom sebagai negara adidaya yang ingin memelihara hegemoni dan pengaruhnya di tingkat global sulit diakhiri.

Referensi

“Bawa Stimulus covid 19, Biden Rayu Eropa Musuhi China,” <https://www.idxchan-nel.com/ecotainment/bawa-stimulus-covid-19-biden-rayu-eropa-musuhi-china>”, diakses 1 April 2021.

“Biden Ubah Pendulum AS dalam Isu Palestina-Israel”, *Kompas*, 9 April 2021, hal. 4.

Laoli, Noverius. “Siap ladeni China, AS langsung kerahkan kapal induk ke Laut China Selatan,” *Kontan.co.id*, 25 Januari 2021, <https://newssetup.kontan.co.id/news/siap-ladeni-china-as-langsung-kerahkan-kapal-induk-ke-laut-china-selatan>, diakses 14 April 2021.

Nainggolan, Poltak Partogi. 2018. *Indonesia dan Rivalitas China, Jepang dan India*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

NguyenHuu, Tam and Deniz Dilan Karaman Örsal. 2020. “ A new and benign hegemon on the horizon? The Chinese century and growth in the Global South”. *Economics E-Journal*, No.14, Vol. 12: 1-34.

“Saudi, PBB dan AS Bahas Penyelesaian konflik Yaman”, *Republika*, 30 Maret 2021, hal. 4.



Ziyad Falahi
ziyad.falahi@dpr.go.id



Poltak Partogi Nainggolan
partogi.nainggolan@dpr.go.id

Ziyad Falahi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S-1 Hubungan Internasional Universitas Air-langga pada tahun 2010. Lulus S-2 Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia pada 2012. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert Ludwigs - Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan judicium magna cumlaude. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian Seketariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku antara lain: *Masalah-Masalah Keamanan Abad ke-21* (Penerbit Obor, 2020), dan *Konflik Internal dan Kompleksitas Proxy War di Timur Tengah* (Penerbit Obor, 2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.